



PENETAPAN

Nomor 0383/Pdt.P/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sutrisno bin Tarkum, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nowo Nugroho MS, SH, Advokat yang berkantor di Perumahan Bumi Tanjung Elok, Jl. Waru 1 No. 081, Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, orangtua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 0383/Pdt.P/2022/PA.Pwt tanggal 13 Desember 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Istrinya yang bernama FENI LISNAWATI binti SAMINGUN SALIP adalah suami istri yang sah, sebagaimana ketentuan dalam syariat islam dan undang-undang perkawinan pada umumnya;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan FENI LISNAWATI binti SAMINGUN SALIP tidak mempunyai anak;
3. Bahwa Pemohon dan FENI LISNAWATI binti SAMINGUN SALIP sekarang mengasuh seorang anak bernama AMELIA hasil hubungan badan

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara YATI (ibunya amelia) dengan seorang laki-laki yang tidak bertanggungjawab;

4. Bahwa ibu YATI (ibunya amelia) sekarang sudah tidak diketahui dengan jelas keberadaanya, begitu juga dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut tidak diketahui dengan jelas keberadaanya sampai sekarang;

5. Sebagai rasa tanggungjawab Pemohon hendak menikahkan anak angkatnya bernama AMELIA binti YATI, Lahir di Banyumas, tanggal 7 Agustus 2006, umur 16 tahun, kelamin laki-laki, WNI, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat : KABUPATEN BANYUMAS; dengan calon suami, yakni ;;

ANGGI BUDIYONO bin SUDARNO, lahir di Banjarnegara, tanggal 26 Juli 2002, umur 20 tahun, kelamin laki-laki, WNI, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, alamat : Desa Karangtengah, RT. 003, RW. 003, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali hakim;

6. Bahwa segala persyaratan nikah baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesemuanya telah terpenuhi, kecuali ada satu syarat yang belum terpenuhi, yakni tentang usia anak angkat Pemohon yang belum mencapai batas minimal umur yang di bolehkan (baru berumur 16 tahun);

7. Bahwa sebagai akibat belum cukup umurnya anak angkat Pemohon sebagaimana tersebut angka 4, maka Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah menerbitkan surat penolakan untuk menikahkan anak Pemohon, Nomer B- 1081/Kua.11.02.15/Pw.01/12/2022, tanggal 12 Desember 2022;

8. Bahwa menurut Pemohon pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cukup lama (sekitar 1 tahun lebih), dan menurut Pemohon, hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga di khawatirkan akan melakukan

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon menjamin bahwa anak angkat Pemohon dengan calon suami anak angkatnya tersebut tidak terhalang oleh adanya larangan menikah seperti sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pernikahan menurut islam;

10. Bahwa anak angkat Pemohon berstatus perawan, dan telah siap untuk menjadi istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menetapkan memberikan ijin dispensasi nikah kepada anak angkat Pemohon bernama AMELIA binti YATI untuk menikah dengan ANGGI BUDIYONO bin SUDARNO,;
3. Memerintahkan kepada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali hakim untuk menikahkan dan mencatatkan anak angkat Pemohon bernama AMELIA binti YATI dan dengan calon suaminya ANGGI BUDIYONO bin SUDARNO,;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang dengan didampingi kuasanya menghadap ke persidangan lalu Hakim telah berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena menurut Pemohon hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu akrab dan sulit untuk dipisahkan, sehingga kalau tidak dinikahkan khawatir akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum dan Agama;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan anak angkat Pemohon (calon mempelai wanita) di depan persidangan bernama Amelia, umur 16 tahun yang menerangkan:

- Bahwa pihaknya telah mengenal calon mempelai pria dan sudah cukup lama menjalin hubungan cinta (berpacaran) dan hubungannya sudah sangat erat sehingga kalau tidak segera menikah khawatir akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa kehendak untuk menikah atas persetujuan kedua belah pihak tanpa ada ancaman atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur namun sudah *baligh*, telah siap secara jasmani maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai pria di depan persidangan bernama Anggi Budiyo umur 20 tahun yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya mengenal calon mempelai wanita sudah cukup lama dan menjalin hubungan cinta (berpacaran) yang sudah sangat erat sehingga khawatir kalau tidak segera menikahi anak Pemohon khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa kehendak menikah atas dasar persetujuan kedua belah pihak, bukan karena adanya ancaman atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya sudah siap secara moril maupun materiil sudah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua / keluarga calon mempelai pria bernama dan menerangkan ; “ pihaknya telah melamar orangtua calon mempelai wanita dan lamarannya telah diterima, namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen xxxxxxxxx

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx ditolak karena anak angkat Pemohon belum cukup umur 19 tahun sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Agama dan selaku orangtua / keluarga siap untuk membantu secara moril maupun materiil dan membimbing kedua calon mempelai apabila sudah menjadi pasangan suami isteri. ”;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

1. Asli Surat Model N-5 tentang Pemberitahuan adanya kekurangan Persyaratan / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen xxxxxxxx xxxxxxxx. diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama **Sutrisno** yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil xxxxxxxx xxxxxxxx. diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama kepala keluarga **Sutrisno** yang dikeluarkan oleh kantor Dindikcapil xxxxxxxx xxxxxxxx diberi tanda (P.3);
4. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Amelia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kranjan Kecamatan Pekuncen xxxxxxxx xxxxxxxx diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Amelia yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Amelia, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Krajan, Pekuncen, Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Keterangan dokter sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama Amelia yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pekuncen xxxxxxxx xxxxxxxx diberi tanda (P.8);

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2022/PA.Pwt



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai pria Anggi Budiyo yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi tanda (P.7);

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti Surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Kusnianto bin Salip alias Samingin**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang kayu tempat tinggal di RT 01 RW 06 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak angkat Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak angkat Pemohon (calon mempelai pria);
- Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta (berpacaran), hubungannya sudah sangat akrab sehingga Pemohon khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah, tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusu an ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur tetapi sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria sudah cukup umur dan sudah bekerja sebagai swasta ;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;



2. Fatur Rokhman bin Anshori, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan perangkat desa tempat tinggal di RT 03 RW 05 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak angkat Pemohon (calon mempelai pria);
- Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta (berpacaran), hubungannya sudah sangat akrab sehingga Pemohon khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah, tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusutan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur tetapi sudah *baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
- Bahwa calon mempelai pria sudah cukup umur dan sudah bekerja sebagai swasta ;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara Dispensai Nikah menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama, adapun berdasarkan domisili P ara Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto maka sesuai dengan kewenangan relatif sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak angkatnya sampai cukup umur dengan memberikan penjelasan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bisa membendung keinginan anak angkatnya yang ingin segera menikah dengan calon suaminya disebabkan hubungannya sudah cukup lama dan terlalu akrab sehingga khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi ke Pengadilan untuk menikahkan anak angkatnya yang bernama Amelia yang saat ini usianya belum mencapai 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama Anggi Budiyo;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut di atas, Pengadilan telah mendengar keterangan Kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai pria di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat P.1, sampai dengan P. 8, dengan perincian Bukti P.2 sampai dengan P.8 berupa surat-surat yang difotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dimaksudkan sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi *syarat formil* dan *materiil* sebagai bukti, adapun Bukti P.1 adalah surat asli yang dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan / Penolakan Perkawinan model N-5 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Telah membuktikan bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan kehendaknya ke Kantor Urusan Agama tersebut untuk melangsungkan pernikahan anaknya namun ternyata ada kurang persyaratan yaitu belum cukup usia menikah bagi calon mempelai wanita, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah membuktikan Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, atas nama Pemohon harus telah membuktikan bahwa Amelia masuk dalam anggota keluarga Pemohon kedudukannya sebagai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Amelia dikaitkan dengan Bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amelia, telah membuktikan bahwa calon mempelai wanita bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada saat diajukannya permohonan ini masih berumur kurang lebih 16 tahun tahun dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa Ijazah atas nama Amelia, telah membuktikan bahwa calon mempelai wanita pada saat diajukan permohonan ini sudah lulus Sekolah Dasar dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Surat keterangan Dokter, telah membuktikan bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Anggi Budiyo, telah membuktikan bahwa calon mempelai pria bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx saat perkara diajukan berumur kurang lebih 20 tahun dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan keterangan kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai pria dan didukung dengan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Amelia dengan calon suaminya yang bernama Anggi Budiyo disebabkan anaknya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa alasan diajukannya permohonan ini karena kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir apabila dibiarkan akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2022/PA.Pwt



- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas seijin orangtua dan atas persetujuan kedua belah pihak, tidak ada ancaman maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita sekarang sudah tidak dalam kondisi menjalankan pendidikan di sekolah dan calon mempelai pria sudah bekerja;
- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran calon mempelai pria namun ketika didaftarkan ke KUA Kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon sebagai orangtua seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, Pengadilan berpendapat bawa batas usia bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kesiapan mental dan kedewasaan calon mempelai untuk membangun rumah tangga secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, ternyata Undang-Undang memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan pada usia anak dengan cara meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya “ alasan yang sangat mendesak, dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;
- Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan, dan apabila hal ini dibiarkan akan membuka peluang terjadinya perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum dan Agama. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai supaya tidak terjadi perbuatan zina yang bisa menimbulkan perbuatan dosa besar dan *mudharat* pada kedua belah pihak;

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat 17 Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Hal ini juga sejalan dengan Kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

2. Bahwa Kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun sesuai Bukti P.5 namun sudah *aqil baligh*, kondisinya sehat sesuai Bukti P.7 sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari *fitrah* manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana *firman Allah* dalam *Al Qur'an* Surat 24 *An-Nuur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

Dan menikah juga mengikuti *Sunnah Rasulullah SAW*, sebagaimana dalam *Hadits* yang diriwayatkan *At-Tirmidzi* dari *Abu Ayyub Radhiyallahu anhu*, ia menuturkan bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَالُكُ، وَالتَّكَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk *Sunnah para Rasul*: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan anaknya yang bernama Amelia dengan calon suaminya yang bernama Anggi Budiyo;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi Pemohon untuk menikahkan anak angkatnya yang bernama (Amelia binti Yati) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Anggi Budiyo bin Sudarno);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh Dra. Teti Himati sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Purwokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Sri Lestari Wasis, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

Panitera pengganti

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Lestari Wasis, SHI.

Dra. Teti Himati

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	85.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2022/PA.Pwt